

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Afif Zainurroziqin
NIM : C92212145
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi
Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



M. Afif Zainurroziqin

NIM. C92212145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*" yang ditulis oleh M. Afif Zainurroziqin Nim C92212145 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 01 Desember 2015

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moch. Zainul Arifin', with a long horizontal stroke extending to the left.

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.i

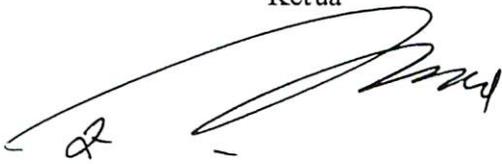
NIP. 197104172007101004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Afif Zainurroziqin NIM C92212145 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

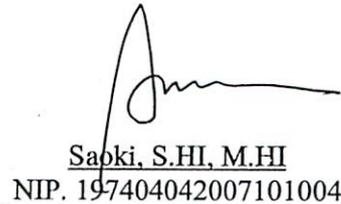
Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua



Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Sekretaris



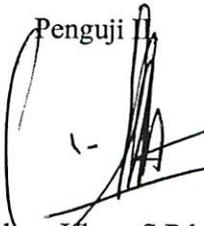
Saoki, S.HI, M.HI
NIP. 197404042007101004

Penguji I,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI
NIP. 197209062007101003

Pembimbing,

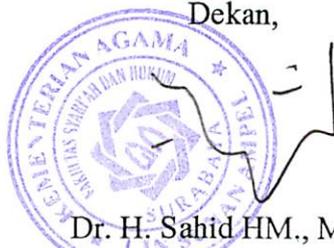


Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Surabaya, 10 Mei 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

Bab tiga membahas tentang data yang akan memaparkan tentang pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah, retribusi parkir dan pengaturannya di daerah, hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta data statistik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya, dan data statistik retribusi parkir kota Surabaya.

Bab empat membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surabaya menurut Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2015 dan bagaimana retribusi parkir di kota Surabaya ditinjau dari hukum Islam disisi lain juga akan melihat cara pengelolaan keuangan daerah apakah sejalan dengan pengelolaan keuangan yang telah diajarkan oleh ajaran Islam.

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.

- a. *Al-Maslahah al-‘Āmmah* (masalah umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
 - b. *Al-Maslahah al-Ghalibah* (masalah mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
 - c. *Al-Maslahah al-Khassah* (masalah khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.
3. Dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara’ terbagi menjadi tiga:
- a. *Maslahah Mu’tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syar’i. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw, dipahami secara barlainan oleh para ulama’ fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
 - b. *Maslahah Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Misalnya, syara’

pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan cirri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, self supporting keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan

Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pelaksana sebagaimana tersebut. Dinas Pendapatan Daerah berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sedangkan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas umum sebagai berikut :

- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
- b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan
- c. Membuat rancangan-rancangan Peraturan Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan rancangan keputusan pelaksanaannya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok
- d. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Gubernur sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan
- e. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pemungutan Daerah;

Pembiayaan Daerah :

No.	Bentuk	Jumlah
1.	Penerimaan	Rp. 643.971.896.469,-
2.	Pengeluaran	Rp. 16.472.668.470,-

Pembiayaan Netto	Rp. 627.499.227.999,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. -,-

Pendapatan Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.570.793.944.555,-
Dana Perimbangan	Rp. 1.523.841.223.096,-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 997.964.766.452,-

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak Daerah	Rp. 2.098.292.666.000,-
Retribusi Daerah	Rp. 221.303.062.247,-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 92.461.561.125,-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.158.736.655.183,-

Dana perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :

Dana bagi hasil	Rp. 295.634.740.096,-
Dana alokasi umum	Rp. 1.160.025.693.000,-
Dana alokasi khusus	Rp. 68.180.790.000,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan:

Hibah	Rp. -,-
Dana Darurat	Rp. -,-
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 661.107.493.688,-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 334.460.943.736,-
Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp. -,-
Dana Bagi Hasil Lainnya	Rp. 2.396.329.028,-
Dana Insentif Daerah	Rp. -,-

jasa parkir, dan apabila kendaraan yang di parkir itu musnah atau rusak maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali apabila musnah atau rusaknya kendaraan tersebut disebabkan kelalaian pihak penyedia jasa parkir sendiri.

Pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir juga menyebabkan pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu, pengguna jasa parkir harus memberi upah sebagai biaya parkir atau tarif retribusi parkir.

Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Semua kegiatan yang menyangkut pungutan dan sebagainya tentang parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang kemudian ditinjau lagi dengan melahirkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

